

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA**



NOMOR : 700 / 27.t / LHE / 2021

TANGGAL : 18 Agustus 2021

INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA

Jalan Dipayuda, Nomor 10 Telepon (0286) 591459, 591084

BANJARNEGARA



INSPEKTORAT

Jl. Dipayuda No. 09 Telp. (0286) 591084 Fax. 591459

BANJARNEGARA 53415

e-mail: inspektorat@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 18 Agustus 2021

Kepada:

Nomor : 700 /274 /LHE/Insp/2021
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2020

Yth. Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Banjarnegara
di –

BANJARNEGARA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 700/05 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara serta Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 090/64-ST/Insp/2021 tanggal 3 Mei 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara**, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara memperoleh nilai sebesar **60,30** dengan kategori **B** atau **Baik** dengan interpretasi Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam hasil evaluasi.

5. Gambaran umum Sistem AKIP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, definisi Sistem AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyelenggaraan Sistem AKIP meliputi:

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Pelaporan kinerja;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem AKIP adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

6. Obyek Evaluasi

Data dan dokumen standar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang menjadi obyek evaluasi SAKIP terdiri atas:

- a. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2017-2022.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menyusun Renstra periode tahun 2017-2022 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018.

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 061/1071/Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- c. Dokumen *breakdown* IKU (*cascading*) tahun 2019;
- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020;
- e. RKA murni dan perubahan 2020;
- f. DPA murni dan perubahan 2020;
- g. Perjanjian Kinerja 2020 dan perubahannya (Eselon II-IV dan staf);
- h. Rencana aksi pencapaian kinerja 2020;
- i. Dokumen pengukuran kinerja atas rencana aksi Tahun 2020;
- j. Dokumen laporan evaluasi pengukuran kinerja tahun 2020;
- k. LKjIP 2020;
- l. *Print screen* e SAKIP.
- m. Alamat *Website* (*Print screen upload* dokumen kinerja).

7. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 memperoleh nilai 60,30 dengan kategori B.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	19,34
B	Pengukuran Kinerja	25%	12,19
C	Pelaporan Kinerja	15%	9,80
D	Evaluasi Internal	10%	3,96
E	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	15,00
Penilaian		100%	60,30

Penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **19,34** dari bobot **30%**. Evaluasi atas perencanaan kinerja terdiri dari 2 (dua) sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Perencanaan Strategis	10%	6,14
II.	Perencanaan Kinerja Tahunan	20%	13,20
Penilaian		30%	19,34

Penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja meliputi penilaian terhadap pemenuhan, kualitas serta implementasi Renstra dan perencanaan kinerja tahunan (RKT dan PK). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan proses perencanaan kinerja dengan cukup baik terutama dalam hal perencanaan strategis. Namun demikian, masih terdapat kelemahan mendasar dan perlu perbaikan sebagai berikut:

- 1) Renstra
 - a) Renstra belum direviu secara berkala;
 - b) Renstra belum dilengkapi dengan ukuran (indikator) dan target keberhasilan tujuan;
 - c) Renstra belum sepenuhnya menyajikan IKU yang diformalkan;
 - d) Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKT;
- 2) RKT

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- 3) Perjanjian Kinerja (PK)
 - a) PK belum sepenuhnya menyajikan IKU;
 - b) PK belum dipublikasikan sesuai tahun berkenaan;
 - c) Rencana Aksi belum sepenuhnya mengacu IKU atas target kinerja sasaran

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **12,19** dari bobot penilaian sebesar **25%**. Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Pemenuhan pengukuran	5%	2,50
II.	Kualitas pengukuran	12,5%	7,19
III.	Implementasi pengukuran	7,5%	2,50
Penilaian		25%	12,19

Komponen yang dinilai dalam pengukuran kinerja mencakup pemenuhan, kualitas serta implementasi IKU yang telah diformalkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan proses perbaikan dengan cukup baik dalam pengukuran kinerja dibandingkan kondisi tahun 2019 terutama dalam pemenuhan dan kualitas pengukuran kinerja. Namun demikian, masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

- 1) Indikator eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya;
- 2) Hasil pengukuran atas capaian kinerja tingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.
- 3) Dokumen penganggaran belum mencantumkan IKU sebagai *ultimate outcome* atau *impact*.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **9,80** dari bobot penilaian sebesar **15%**. Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Pemenuhan pelaporan	3%	3,00
II.	Penyajian informasi kinerja	7,5%	4,55
III.	Pemanfaatan informasi kinerja	4,5%	2,25
Penilaian		15%	9,80

Hasil evaluasi untuk komponen ini meliputi penilaian terhadap dokumen LKjIP. Dokumen LKjIP Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah disusun. Dokumen LKjIP menyajikan sebagian informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya baik target kinerja maupun keuangannya.

Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pelaporan kinerja adalah:

1. Laporan kinerja belum menyajikan:
 - a) Data dan analisis efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan;
 - b) Data dan analisis keterkaitan capaian target dengan realisasi anggaran.
2. Informasi yang disajikan dalam LKjIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja. Hal tersebut disebabkan penyusunan LKjIP dilakukan sekedar pemenuhan dokumen, sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja organisasi.

d. Evaluasi Internal

Hasil penilaian terhadap Evaluasi Kinerja memperoleh nilai **3,96** dari bobot penilaian sebesar **10%**. Evaluasi atas evaluasi kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Pemenuhan evaluasi	2,00	0,92
II.	Kualitas evaluasi	5,00	2,29
III.	Pemanfaatan evaluasi	3,00	0,75
Penilaian		10,00	3,96

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah melakukan pemantauan terkait kemajuan pencapaian kinerja, hambatan dan solusi yang tercermin pada pelaporan kinerja, namun demikian terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas program belum memberikan kesimpulan atas keberhasilan/dukungan program terhadap pencapaian kinerja;
2. Evaluasi atas program belum memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
3. Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi belum dimanfaatkan sebagai sarana untuk pengendalian kinerja;
4. Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi belum memberikan saran alternatif untuk perbaikan kinerja setiap periode.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai **15,00** dari bobot penilaian sebesar **20%**. Evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi meliputi penilaian atas 2 (dua) sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>)	7,5%	5,63
II.	Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>)	12,5%	9,38
Penilaian		20%	15,00

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam LKjIP, informasi capaian *output* dan *outcome* telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan,

8. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Aspek Perencanaan

1) Renstra

- a) Renstra agar direviu secara berkala;
- b) Penyusunan Renstra agar dilengkapi dengan ukuran (indikator) dan target keberhasilan tujuan;
- c) Renstra agar menyajikan IKU yang diformalkan;
- d) Dokumen Renstra agar digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKT;

2) RKT

Memastikan seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam dokumen anggaran (RKA, DPA) telah direncanakan dalam RKT.

3) Perjanjian Kinerja (PK)

- a) PK agar disajikan selaras dengan IKU;
- b) PK agar dipublikasikan sesuai tahun berkenaan;
- c) Rencana Aksi agar mengacu IKU atas target kinerja sasaran.

b. Aspek Pengukuran Kinerja

- 1) Indikator eselon III dan IV agar disusun selaras dengan indikator kinerja atasannya;
- 2) Hasil pengukuran atas capaian kinerja tingkat eselon IV keatas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*;

- 3) Memastikan konsistensi implementasi IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Aspek Pelaporan Kinerja
- 1) Laporan Kinerja agar menyajikan data dan analisis efisiensi sumber daya serta data dan analisis keterkaitan capaian target dengan realisasi anggaran;
 - 2) LKjIP agar dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja organisasi, informasi yang disajikan dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja.
- d. Aspek Evaluasi Internal
- 1) Evaluasi atas program agar memberikan kesimpulan atas keberhasilan/dukungan program terhadap pencapaian kinerja;
 - 2) Evaluasi atas program agar memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
 - 3) Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi agar dimanfaatkan sebagai sarana untuk pengendalian kinerja;
 - 4) Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi agar memberikan saran alternatif untuk perbaikan kinerja setiap periode.
- e. Aspek Capaian Kinerja
- Agar meningkatkan keandalan capaian kinerja baik yang bersifat *output* maupun *outcome*.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, terutama terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam tahun 2020.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA



ACHMAD, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620113 198503 1 006